

KEMISKINAN DAN PARADIGMA: MENCARI RESULTAN

Wilhelmus J. Anggal
Pusat Kaji dan Transformasi Sumberdaya Lokal
Flores, Manggarai

santosoteguh61@yahoo.com

ABSTRACT

Poverty could be seen as the son of development. At one side development is intended to create welfare and wellbeing for the human kind, but at the other side it gave birth to poverty and backwardness. The question is why development with its high demand, on the contrary creates poverty? The answer lies in the paradigm used as guidance and framework for development. The paradigm might be wrong in its theoretical assumption as well as practically; or it might be theoretically well but failed in its praxis. It must be accepted that a paradigm has its own limitation and might not be able to address the intended development's objective and needs, which thus might be the cause for poverty. In this article *the people centered development paradigm* is considered well theoretically but failed in its praxis to overcome poverty because it embedded vested interest of the elites. This paradigm has failed from the period of the New Order as well as the current Reformation Order. To overcome poverty, there is a need for a new paradigm.

Key words: poverty, welfare, resultante, paradigm

PENGANTAR

Mimpi tentang sebuah negeri tanpa kemiskinan adalah sebuah obsesi. Akan tetapi, apakah mimpi tersebut dapat menjadi sebuah keniscayaan? Sejarah mencatat setiap pergumulan dan perjuangan mengatasi kemiskinan. Dalam sejarah, kita pernah bermimpi menjadi negeri tanpa kemiskinan sebagaimana mimpi Presiden Soeharto yang dikutip oleh Tadjudin Noer Effendy sebagai berikut: "...dalam tahun 1996 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Indonesia tidak berapa lama lagi akan dapat menuntaskan kemiskinan. Artinya, tidak ada lagi penduduk hidup dalam kemiskinan. Seolah-olah tidak berapa lama lagi ramalan Ronggowarsito akan menjadi kenyataan, yakni negara tata tentram *loh jinawi* segera terwujud. Mimpi indah buain rezim Orde baru adalah bagaikan mimpi tukang cendol putus lotre tanpa pernah mampu membeli kupon lotre.

Meskipun demikian, kita terus berupaya menanggulangi kemiskinan sejak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga Millenium Development Goals (MDG's). Lebih jauh, dalam setiap kampanye pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden, tema kemiskinan menjadi komoditas politik yang laris.

Tidak hanya itu, kemiskinan juga malah menjadi sebuah proposal ‘mahal’ yang dapat dijual. Sebagai sebuah perbandingan, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, tiba-tiba data jumlah penduduk miskin mencapai angka sekitar 80 juta atau 36 persen penduduk Indonesia. Mencengangkan! Menanggapi data tersebut, Philip Clarke, Kepala Perwakilan Program Pangan Dunia (*World Food Program*) dalam harian *Kompas* tanggal 12 Maret 1999 mengatakan, “...perkiraan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 80 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara analitis. Angka itu terlalu dibesar-besarkan. Kalau pernyataan itu benar, ada sekian juta manusia Indonesia terpaksa dimiskinkan setelah krisis...” Tadjuddin Noer Effendi menimpali pernyataan Philip Clarke mengenai angka kemiskinan yang dibesar-besarkan sebagai bukti bahwa kemiskinan dijadikan komoditi yang dapat dijual untuk menggaet dana.

Data kemiskinan di bawah ini disajikan sebagai salah satu contoh model kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Data ini sengaja ditampilkan untuk melihat salah satu fenomena kemiskinan di daerah yang dapat dijadikan refleksi.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2008 mengalami perkembangan yang positif sebagaimana digambarkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari 4,3% pada tahun 2007 menjadi 4,9% pada tahun 2008 (lihat Tabel 1). Pemisahan data sebagai konsekuensi pembentukan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai yang hanya terdiri dari sembilan kecamatan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi gabungan Manggarai dan Manggarai Timur dalam kurun waktu 2005-2007.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Manggarai 2005-2008 menurut Harga Konstan Tahun 2000

Uraian	2005*	2006*		2007*		2008**	
	Rp.	Rp.	Pertumbuhan (%)	Rp.	Pertumbuhan (%)	Rp.	Pertumbuhan (%)
Kab. Manggarai & Manggarai Timur	788.170.576	813.330.857	3,2	845.827.982	4,0	-	-
Kab. Manggarai (9 Kecamatan)	465.250.271	483.261.395	3,9	504.111.126	4,3	528.590.475	4,9

Catatan : * Data BPS Kab. Manggarai ; ** Data Perkiraan Bappeda Kab. Manggarai

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT KECAMATAN

Jika diamati pertumbuhan ekonomi per kecamatan (lihat Tabel 2 di bawah), capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% pada tahun 2008 terutama disumbangkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Langke Rembong yang bertumbuh sebesar 6,8%. Rata-rata pertumbuhan selama tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa perekonomian bertumbuh rata-rata 4,6% per tahun, yang berarti mendekati target rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Kab. Manggarai 2005-2010 yang ditetapkan sebesar 5% per tahun.

Tabel 2. Perkembangan PDRB per Kecamatan 2006-2008 menurut Harga Konstan Tahun 2000

Kecamatan	2006		2007		2008		Rata-Rata Pertumbuhan 2005-2008
	Rp.	Pertumbuhan (%)	Rp.	Pertumbuhan (%)	Rp.	Pertumbuhan (%)	
Satar Mese	80.639.989	2,3	83.652.387	3,7	86.466.712	3,4	3,5
Langke Rembong	198.236.125	5,3	206.551.193	4,2	220.509.489	6,8	5,5
Ruteng	82.004.566	3,0	85.090.295	3,8	88.179.779	3,6	3,7
Wae Rii	26.681.240	2,3	27.489.409	3,0	28.446.920	3,5	3,3
Cibal	43.715.049	2,7	45.674.711	4,5	47.240.305	3,4	4,0
Reok	51.986.426	4,1	55.655.481	7,1	57.747.270	3,8	5,4
	483.263.395	3,9	504.113.476	4,3	528.590.475	4,9	4,6

Catatan : *Data dari BPS Kab. Manggarai ; **Data Perkiraan Bappeda Kab. Manggarai

PENDAPATAN PER KAPITA

Meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai masih berada di bawah pendapatan per kapita Provinsi NTT (lihat Tabel 3 di bawah). Namun, pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai yang bertumbuh 10,4% pada tahun 2008 terlihat jauh lebih baik daripada pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata NTT yang hanya bertumbuh 4,6%.

**Tabel 3. Perkembangan Pendapatan per Kapita
Kabupaten Manggarai 2003-2008**

Tahun	Manggarai		NTT		Selisih (Rp)
	Rp	%	Rp	%	
2003	1.749.852		2.626.180		876.328
2004	1.873.407	7,1	2.923.409	11,3	1.050.002
2005	2.137.083	14,1	3.281.657	12,3	1.144.574
2006	2.276.455	6,5	3.658.383	11,5	1.381.928
2007	2.488.440	9,3	4.043.024	10,5	1.554.584
2008	2.746.818	10,4	4.229.404	4,6	1.482.586

TINGKAT KEMISKINAN

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, perkembangan angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan (lihat Tabel 4 di bawah). Hal ini terlihat dari menurunnya persentase kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Manggarai dari 67,8% pada tahun 2005 menjadi 63,9% pada tahun 2008. Meskipun demikian, persentase KK miskin di Kabupaten Manggarai masih lebih tinggi daripada rata-rata persentase KK miskin Provinsi NTT yang sebesar 56,75%. Hal itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2008 masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, yakni di Kecamatan Langke Rembong, yang merupakan pusat administratif pemerintahan. Selain Langke Rembong, persentase KK miskin yang rendah juga tercatat di Kecamatan Satar Mese, sedangkan kecamatan-kecamatan lain mencatat persentase KK miskin berada di atas rata-rata Kabupaten Manggarai.

Tabel 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 dan Tahun 2008

No.	Kecamatan	2005			2008		
		Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	%	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	%
1	Satar Mese	12.876	8.036	62,4	13.389	7.840	58,6
2	Langke Rembong	10.146	4.729	46,6	10.406	4.533	43,6
3	Ruteng	14.283	10.073	70,5	15.013	9.877	65,8
4	Wae Rii	5.272	4.362	82,7	5.516	4.166	75,5
5	Cibal	8.887	7.136	80,3	8.627	6.940	80,4
6	Reok	6.701	5.092	76,0	6.958	4.896	70,4
<i>Manggarai</i>		58.165	39.428	67,8	59.909	38.252	63,9

Kemiskinan memang memiliki berbagai bentuk, ukuran, ideologi, dan karakter. Meskipun demikian, penulis tidak menyoroiti secara khusus bentuk dan karakter kemiskinan, tetapi akan melihat keterkaitan antara paradigma (pembangunan) dan kemiskinan sejak Orde Baru yang sentralistik dan otoriter sampai pada era Reformasi yang desentralistik dan demokratis. Apakah ada kaitan antara paradigma pembangunan dan model/metode penanggulangan kemiskinan dan sejauh mana dampaknya?

UKURAN DAN DIMENSI KEMISKINAN

Umumnya, masyarakat sudah mengetahui ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang 'latah' digunakan secara objektif adalah sebagai berikut. Pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dengan tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Konsep kemiskinan absolut berpedoman pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat. Karena itu, rumusannya selain konseptual, juga konkret. Walaupun terdapat ukuran kemiskinan lain, ukuran kemiskinan absolut masih dijadikan acuan utama. Kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antarlapisan sosial. Misalnya, membedakan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok tertentu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya.

Meskipun ukuran kemiskinan penting, kemiskinan relatif memiliki keterbatasan cakupan. Karena itu, ukuran kemiskinan harus dilengkapi dengan

dimensi kemiskinan agar dapat merepresentasi kebutuhan masyarakat miskin. Apalagi, kenyataannya, ukuran kemiskinan selama ini bersifat ekonomis sehingga menegasikan kebutuhan manusia seluruh dan seutuhnya. Memaksakan ukuran ekonomi untuk menentukan kemiskinan sama dengan menegasikan kebutuhan nonekonomis manusia. Faktanya, kebutuhan manusia bervariasi, tidak hanya ekonomi. Pemenuhan ukuran kemiskinan direduksi pada masalah dan ukuran ekonomis semata, sementara ukuran tersebut tidak merepresentasi persoalan kemiskinan secara utuh. Kenyataannya kebutuhan manusia itu multidimensional. Sunyoto (2003: 127) mengatakan bahwa sedikitnya ada dua macam dimensi kemiskinan, yaitu dimensi kultural dan dimensi struktural. Setiap perspektif ini memiliki acuan, metodologi, dan tekanannya yang berbeda dalam menganalisis masalah kemiskinan.

Dalam dimensi kultural, terdapat tiga tingkat analisis kemiskinan: individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality*, seperti sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung, dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai objek yang perlu digarap daripada subjek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Dimensi struktural melihat masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang memperhatikan hasil pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

PARADIGMA PEMBANGUNAN

Paradigma merupakan sebuah model teori atau konsep yang dipakai sebagai acuan berpikir dan bertindak. Sementara itu, Faqih (2008) menuliskan pembangunan sebagai usaha bertahap menuju modernisasi, yang meliputi sekularisasi, komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup materi, literasi, pendidikan, media massa, persatuan nasional, dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi. Karena itu, pembangunan membutuhkan paradigma sebagai acuan. Acuan di dalam membangun negara-bangsa ini.

Di dalam sejarah membangun negara-bangsa ini, menurut Tjokrowinoto (2002:216), terdapat tiga paradigma yang menjadi acuan pembangunan. Pertama, *Production Centered Development (PCD)*. Kedua, paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*). Ketiga, paradigma *People Centered Development*. Di bawah ini disajikan masing-masing postur dari ketiga paradigma tersebut yang dilengkapi dengan berbagai dampak, kelemahan, dan kekuatannya.

Production Centered Development (PCD)

Karakteristik *PCD*, antara lain sebagai berikut: (a) berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta kenaikan tingkat konsumsi masyarakat; (b) konsentrasi pemilikan alat produksi; dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas, dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi; (c) optimalisasi pemanfaatan kapital. Sistem perencanaan yang sentralistik di dalam realitanya telah gagal mewujudkan *'trickle down development'* sebagaimana dijanjikan.

PCD berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, terjadi efek menetes ke lapisan masyarakat bawah yang ditunjang oleh stabilitas politik (sentralisasi, deparpolisasi, departisipasi, depolitisasi, represi, kooptasi, dan lain-lain). Untuk menciptakan stabilitas politik, negara (*state*) mengambil posisi yang sentral dan dominan dengan membentuk aliansi strategis yang terdiri dari militer, penguasa, teknokrat, dan pengusaha. Aliansi strategis ini memposisikan negara secara dominan (peran dominasi negara). Sementara itu, masyarakat diorganisir menurut kesamaan fungsi dan spesialisasi, seperti KORPRI, PKK, PGRI, ORGANDA, IDI, dan HKTI. Masyarakat diorganisir agar dapat terkooptasi dengan cara meniadakan pluralisme, mengurangi akses masyarakat pada politik, tidak membiarkan banyak partai politik bertumbuh, dan membiarkan masyarakat memilih partai GOLKAR (mesin politik negara). Negara, dengan demikian, dengan mudah menentukan kebijakan pembangunan menurut kepentingannya (aliansi). Negara juga diperkuat oleh birokrasi yang andal. Menurut King dalam Tjokrowinoto (2002:185), di Indonesia berlaku *bureaucrati authoritarian regime*. *Bureaucrati authoritarian model* mempostulasikan suatu dominasi politik yang *distinct*, modern, dan relatif stabil yang timbul di dalam kerangka konfigurasi historis dan kondisi politik yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kekhususannya dan mengeliminasi kekuatan-kekuatan distabilitas yang timbul dalam proses modernisasi karena hakikat struktur dan prosesnya sendiri. King mendasari legitimasinya dalam membina landasan legitimasi yang bersifat pluralistik, yang merupakan kombinasi dari karakteristik campuran yang amat diperhitungkan antara prinsip-prinsip tradisional, kharismatik, legal, substantif-rasial, dan efisisensi teknis.

Akibatnya, selama masa Orde baru, sistem politik yang di(berlaku)kan oleh negara bersifat monolitik, bertentangan dengan kondisi kita yang heterogenistik. Pluralisme sebagai sebuah pluriformitas ditekan demi *status quo* sosial (politik). Birokrasi lebih melayani kepentingan rezim politik daripada kepentingan rakyat. Birokrasi cenderung menjauh dan tercerabut dari masyarakat. Terjadi praktik kolusi antara birokrasi pemerintah dan pihak kekuatan ekonomi swasta. Represi ideologis dibangun untuk menakuti rakyat secara politik sehingga ruang kontrol dan kritik rakyat tertutup dengan memanipulasi budaya (simbol-simbol kultural) yang pada gilirannya membuat rakyat memandang pengusaha sebagai makhluk yang seolah-olah tanpa cacat cela dan tak perlu dikontrol lagi. Pembangunan hanya melahirkan "cara-cara pemberdayaan ekonomi" untuk elite, tetapi juga menciptakan "ketidakberdayaan politis" masyarakat lapisan tertentu. Maka tidak heran kalau kemiskinan terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak

memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Asumsinya orang yang miskin secara struktural (politis) miskin pula secara materi.

Kelemahan PCD dapat dilihat misalnya, dalam bidang pertanian yang menyentuh sektor agraris, program-program intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian. Di satu sisi, program ini berhasil meningkatkan hasil produksi secara besar-besaran (surplus), tetapi, di sisi lain, ternyata hanya kelompok kaya yang dapat memanfaatkan surplus tersebut. Terjadi disparitas sosial ekonomi. Hal itu terjadi karena, pertama, berkaitan dengan akumulasi kapital. Kelompok kaya memperoleh akses yang lebih banyak untuk mendapatkan aset-aset tambahan yang datang bersamaan dengan perkembangan teknologi modern. Konsekuensinya mereka lebih cepat berkembang. Kedua, berkaitan dengan fungsi lembaga. Dalam rangka menunjang introduksi teknologi baru, dibentuklah lembaga ekonomi. Idealnya lembaga-lembaga ini dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan teknologi, fungsi produksi, dan struktur pasar sehingga konsumen ikut menikmatinya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, justru lembaga tersebut melahirkan stratifikasi sosial baru. Akibatnya, lembaga itu tidak dapat memberikan fasilitas secara optimal kepada semua lapisan masyarakat, kecuali hanya kelompok kaya yang dapat menikmatinya.

Beberapa contoh di bawah ini, seperti Revolusi Hijau yang dipandang berhasil, ternyata membawa dampak buruk, seperti disinyalir Usman (2003:127) berikut.

...Di pedesaan, telah sejak lama terjadi apa yang lazim disebut *green revolution*, yaitu suatu bentuk transformasi yang dahsyat dari sistem pertanian sederhana menjadi sistem pertanian moderen. Transformasi itu dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan yang sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional. Hasilnya telah mengangkat negara ini dari salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang berswasembada pangan. Keberhasilan ini di samping secara akademis telah menggugat kemapanan teori evolusi pertanian, juga membuka mata dunia bahwa negara ini telah mampu meningkatkan produksi padi secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai ilustrasi, peningkatan produksi padi di Jawa dari 1,81 ton per hektar menjadi 3,01 ton per hektar hanya memakan waktu kurang lebih 68 tahun (1880-1948), sedangkan di Taiwan, peningkatan dari 1,35 ton per hektar menjadi 3,24 ton per hektar memerlukan waktu 57 tahun (1913-1970).

Bila direfleksikan lebih jauh, mengapa malah Revolusi Hijau membawa dampak buruk? Memang, persoalan tersebut kompleks sifatnya. Baik petani kaya maupun petani gurem tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan fasilitas yang diintroduksi.

...Banyak studi memperlihatkan bahwa proses introduksi itu ternyata dibingkai oleh iklim ketidakadilan. Banyak barang dan jasa didistribusikan mengikuti jalur kekuasaan dan dengan demikian mereka yang berkuasa lebih

banyak memonopoli barang dan jasa. Proses monopoli dapat dijelaskan, pertama, berkaitan dengan akumulasi kapital. Petani kaya memperoleh kesempatan yang lebih banyak dalam mendapatkan aset-aset tambahan yang datang bersamaan dengan perkembangan teknologi pertanian moderen. Akibatnya, mereka dapat lebih cepat berkembang. Kedua, berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga yang dibentuk untuk menunjang teknologi pertanian itu sendiri. Lembaga-lembaga itu dibentuk untuk mengakomodasi fungsi produksi, struktur pasar, dan preferensi konsumen. Namun, dalam kenyataannya, hanya petani kayalah yang banyak menikmati jasa-jasa kelembagaan. Mereka adalah kelompok elite yang kerap kali sangat determinan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan krusial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Di daerah perkotaan, kondisinya hampir sama meskipun wajahnya agak berbeda. Di antara para pengusaha yang memperoleh kucuran dana untuk menunjang proses industrialisasi, ternyata banyak yang melakukan manipulasi dan monopoli. Dengan dalih efektivitas dan efisiensi, mereka telah 'merampas' tanah dan tenaga kerja yang murah dalam proses produksi. Ironisnya beberapa kebijakan justru memperlicin proses perampasan itu (Usman 2003:131-133).

Paradigma Kesejahteraan

Paradigma ini lahir ketika *PCD* dengan orientasi pertumbuhan ekonominya - sebagaimana diasumsikan - justru melahirkan disparitas sosial. Cita-cita memperbesar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi demi efek menetes ke lapisan masyarakat bawah dengan ditunjang oleh stabilitas politik ternyata gagal. Karena itu, diciptakan strategi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan dan penanggulangan kemiskinan (*growth-cum poverty alleviation and social equity*) baik melalui "efek tetesan" (*trickle down effect*) maupun intervensi langsung (*direct attack*). Hanya saja, meskipun paradigma ini berusaha menjawab persoalan pertumbuhan sekaligus pemerataan, tidak ditempatkan dalam ukuran dan dimensi kemiskinan yang proporsional sebab ukuran kemiskinan lebih menggunakan pendekatan neoklasik (ekonomi/materi) dengan mengacu dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Paradigma kesejahteraan menjanjikan tingkat kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (*social equity*). Komitmennya adalah melaksanakan sejumlah besar program yang akan mengantarkan hasil pembangunan kepada sebagian terbesar anggota masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin melalui lajur yang selangsung mungkin, terutama sekali dengan cara meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Pendekatannya adalah melalui perancangan program yang memberi paket teknologi, sarana produksi (bibit insektisida, pupuk, dan sebagainya), dana, logistik, sistem pemasaran, serta subsidi yang diharapkan dapat mendorong masyarakat tumbuh dan sejahtera.

Beberapa contoh penerapan paradigma kesejahteraan dalam menanggulangi kemiskinan selama Orde Baru, antara lain proyek INPRES, pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi; penyediaan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah, seperti KUPEDES, KURK, BKK,

KCK, kredit bimas; pembangunan infrastruktur pedesaan, khususnya pengembangan pertanian; pengembangan kelembagaan, seperti program pengembangan wilayah (PPW), pengembangan kawasan terpadu (PKT), program peningkatan pendapatan petani kecil (PAK); program pengentasan melalui inpres desa tertinggal (IDT), yaitu upaya mengentas lapisan miskin secara komunal; pengembangan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan lain-lain.

Akan tetapi, kelemahan paradigma kesejahteraan, menurut Korten dan Alfonso, sebagaimana dikutip Tjokrowinoto (2002:217) adalah paradigma ini cenderung memandang rakyat sebagai objek melalui *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, asuh (*nurture*), dan potensi. Hal itu makin meningkatkan dependensi masyarakat terhadap birokrasi, dan menjadi kendala bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustained development*) dari segi manajemen pembangunan. *Welfare-oriented development* ataupun *equity oriented development* mengandung dua kelemahan pokok. Pertama, program-program kesejahteraan yang didesain, dibiayai, dikelola secara sentralistik itu memerlukan biaya yang mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh birokrasi. Kedua, program-program kesejahteraan semacam itu terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang tegar dan tidak luntur, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan rakyat. Sebaliknya, rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang dapat diberikan oleh birokrasi, sedangkan partisipasi yang menyertai gaya pembangunan ini seringkali lebih merupakan mobilisasi, partisipasi masyarakat dalam implementasi program daripada partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Bagaimana dampak paradigma kesejahteraan ini? Berikut ditampilkan pengalaman masyarakat manakala menerima program kemiskinan yang difasilitasi pemerintah. Sebagai contoh, soal jaringan pengaman sosial yang bertujuan agar penduduk miskin dan yang mengalami krisis tidak terpuruk sengsara. Sebuah program yang baik dan manusiawi. Implementasinya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Persoalannya adalah berikut. Pertama, tak mudah mengidentifikasi sasaran. Indikator yang ada adalah data dari inpres desa tertinggal (IDT), seperti prasejahtera dan prasejahtera I. Sementara itu, data dasar yang digunakan untuk IDT adalah data hasil pengumpulan tahun 1996 (sebelum krisis berlangsung), sedangkan krisis mulai tahun 1997 sehingga sulit menemukan orang miskin (terpuruk) akibat krisis di lapangan.

Kedua, dampak krisis berbeda di setiap masyarakat/daerah. Krisis lebih dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang industrial, yang tergolong kelas menengah atas. Mereka mendapat pesangon dan mempunyai tabungan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja di sektor lain.

Soal program IDT, misalnya, menarik karena menjanjikan kemandirian kelompok masyarakat kecil, yang secara ekonomis merupakan basis perkembangan perekonomian rakyat. Namun, dalam implementasinya, sangat kompleks. Memang, beberapa desa tertinggal semakin berkembang dan kelompok miskin meningkat pendapatannya setelah menjadi bagian dari program IDT. Akan tetapi, kenyataannya juga, tidak sedikit desa tertinggal lainnya hampir tidak berkembang. Jumlah dana yang tersalur di desa-desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, pemanfaatannya

tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, dan pendampingannya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Paradigma People Centered Development

Paradigma ini merupakan paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang merupakan reaksi (refleksi) terhadap paradigma *production centered development* dan *welfare paradigm*. Paradigma ini muncul tahun 1980-an, melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*). Pusat perhatian *people centered development* adalah pembangunan manusia (*human growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*human ecology*); sumber pembangunan yang utama adalah informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak akan pernah habis; tujuannya yang utama adalah perkembangan manusia, dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia (Korten 1984 dalam Tjokrowinoto 2002:216-219). Paradigma ini memberikan peranan kepada individu sebagai subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan sehingga dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan, serta memiliki akses atas aset-aset dan sumber-sumber demi hidup mereka. Paradigma ini memberi tempat yang penting bagi inisiatif, prakarsa, kreativitas, dan keanekaragaman lokal. Paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri, berdaya, dan otonom sebagai suatu sistem yang dapat mengorganisasi diri mereka sendiri.

Pokok pikiran yang terkandung dalam paradigma ini menjadi tumpuan pengelolaan sumber daya lokal. Pengelolaan sumber daya lokal merupakan suatu manajemen pembangunan yang lahir demi menjawab kebutuhan pembangunan, seperti kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan. Aksentuasi dan artikulasi pengelolaan sumber daya lokal terletak pada teknologi *social learning* dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan diri.

Manifestasi pengelolaan sumber daya lokal bervariasi. Terdapat sejumlah pokok pikiran yang terkandung di dalam pengelolaan sumber daya lokal, yaitu (1) keputusan dan inisiatif untuk mengidentifikasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal ditentukan oleh warga masyarakat sendiri secara partisipatoris dan demokratis; (2) kapasitas rakyat miskin diperkuat dalam mengelola aset-aset yang ada pada masyarakat setempat demi pemenuhan kebutuhannya; (3) kebebasan diberikan kepada individu dalam menentukan keputusan dan pilihan-pilihan secara toleransif dan desentralistik; (4) metode dialog partisipatif, *experiential*, membangun kesadaran kritis (*contientisasi*), misalnya, digunakan melalui *social learning*, bagi individu di dalam berinteraksi secara interpersonal dan organisatoris; (6) pengorganisasian ditingkatkan sehingga tumbuh budaya kelembagaan secara otonom, mandiri, interaktif, dialogis, kritis, dan setara; (7) jaringan koalisi antar-*stakeholder* terbangun, seperti kelompok-kelompok penerima manfaat dan pemerintah daerah

sehingga memperkuat penguasaan (akses) dan kontrol serta memiliki kapasitas untuk mengolah sumber-sumber setempat.

KEMISKINAN DAN SEKELUMIT PENGALAMAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Orde Baru telah menunjukkan *political will* dengan menetapkan paradigma sebagai acuan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua paradigma mampu mensejahterakan masyarakat, malahan, sebaliknya ada paradigma yang melahirkan persoalan sosial baru seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan. Paradigma *production centered development* (1960-an) dan *welfare* (1970-an), misalnya, mengalami kegagalan dalam mentransformasikan masyarakat. Karena itu, mencari dan menemukan paradigma baru yang tepat merupakan tuntutan. Lahirnya paradigma *people centered development* merupakan jawaban atas kegagalan paradigma-paradigma sebelumnya. Hanya saja, munculnya paradigma *people centered development* pada tahun 1980-an justru pada saat negara menerapkan stabilitas politik, sementara paradigma ini membutuhkan syarat demokrasi. Pilihan paradigma *people centered development* tepat, tetapi tidak situasional sehingga tidak berkembang baik pada masa Orde Baru.

Merespons lahirnya paradigma tersebut, pada awal tahun 1980-an, di Indonesia pernah gencar didiskusikan paradigma pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, perdebatan itu kurang melahirkan kebijakan publik yang konkret, bahkan cenderung sekadar mode debat akademik (kegenitan intelektual), sedangkan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), paradigma menjadi bahan aksi, refleksi yang konkret dalam memberdayakan masyarakat meskipun harus berhadapan dengan rezim Orde Baru yang otoriter. Pada tahun 1985-an, misalnya, di Provinsi NTT, Yayasan Alfa Omega (YAO), dalam memberdayakan masyarakat menerapkan paradigma *PCD* justru pada saat Orde Baru berkuasa. LSM ini muncul ketika pembangunan membutuhkan paradigma baru. Sebuah langkah strategis dan berani justru pada saat pemerintah menerapkan politik stabilitas dan masih gandrung dengan paradigma *PCD* dan *welfare development*. Sebuah posisi yang sulit pada saat itu. Apa kata YAO tentang posisi dirinya di tengah Orde Baru waktu itu? "...bahwa kehadiran YAO berada dalam puncak keemasan otoriterisme di Indonesia yang memposisikan LSM secara diametral berhadapan dengan pemerintah. Bahwa ciri otoriterisme di mana pemerintah memonopoli ruang kekuasaan telah memposisikan pemerintah sebagai agen tunggal pembangunan dan modernisasi...." (YAO 2005:38). YAO memilih paradigma *PCD* sebagai ideologi gerakannya dengan mempertimbangkan visi YAO: "...bahwa LSM bukan seperti apa yang dipersepsikan oleh penguasa. LSM merupakan organisasi rakyat untuk menggugat model *top down* pembangunan yang bias rakyat. Pendekatan YAO dan umumnya LSM yang *people centered development* telah membangun kekuatan rakyat lokal untuk mandiri menolong diri sendiri, untuk mendekonstruksikan persepsi pembangunan sebagai tindakan dari luar saja. YAO mempunyai andil dalam menggagas dan mempraktikkan pembangunan dari bawah, sehingga model itu menjadi prototipe program

pemberdayaan rakyat seperti yang diterima secara luas oleh lembaga-lembaga pemerintahan sekarang ini. YAO dalam pendekatannya telah mengubah rakyat dari objek menjadi subjek yang memiliki kapasitas....” (YAO, 2005:39).

Mengamati ukuran kemiskinan yang dikenakan selama ini, dalam YAO dinyatakan mengatakan sebagai berikut: “Kemiskinan diubah dalam persentase angka-angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; orang miskin dieksploitasi sebagai iklan pembangunan dan akhirnya prestasi pembangunan hanya ditujukan oleh angka penurunan kemiskinan dan angka-angka pertumbuhan ekonomi, padahal belum tentu menurunnya angka-angka kemiskinan merepresentasikan perbaikan kondisi orang miskin. Karena itu, secara mekanistik, pembangunan lebih memburu angka dan mengabaikan kemiskinan itu....

Bahkan, kemiskinan sering direpresentasikan oleh indikator tingkat pendapatan masyarakat yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan ditentukan oleh berbagai faktor lainnya, seperti tingkat produksi, teknologi, modal sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Di pihak lain, dalam pandangan kaum strukturalis, kemiskinan juga disebabkan oleh struktur sosial, budaya, dan politik yang menyebabkan ketidakadilan kaum miskin memperoleh akses untuk bertumbuh dan berkembang. Ketergantungan menjadi aspek yang diduga kuat menciptakan kemiskinan, baik ketergantungan terhadap bantuan maupun terhadap pemerintah dan lembaga luar mereka (*outsider*) (YAO 2005:55).

Pengalaman YAO dalam menanggulangi kemiskinan dengan merujuk pada paradigma *PCD* patut direfleksikan. Bagaimana YAO memandang kemiskinan?

The root of development is poverty. Kemiskinan adalah suatu hakikat bahwa individu ataupun komunitas manusia mengalami dehumanisasi akibat kondisi tidak manusiawi yang tampak dari kekurangan pangan, tak berdaya menghadapi kematian, tertindas dari struktur kekuasaan. Akumulasi dari semua itu membuat kondisi mereka begitu rentan dan *vulnerable*. Karena itu, upaya atau intervensi untuk mengubah kondisi kemiskinan itu merupakan panggilan manusiawi, suatu tuntutan nilai etis dan bukan tuntutan politis saja. Pengalaman pembangunan di bawah kekuasaan negara, nilai pembangunan kurang mendapat tekanan yang berarti (YAO 2005:65)

PEMBERDAYAAN POLITIK DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA LOKAL

Menanggulangi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin untuk mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Penanggulangannya bersifat multidimensional. Pemberdayaan politik pada lapisan miskin merupakan prasyarat agar terjadi pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena berbagai hal, suara mereka terpendam dalam struktur politik. Agar keluar dari jeratan kemiskinan, mereka perlu pemberdayaan politik agar dapat bersuara dalam struktur politik tersebut. Semakin tinggi akses politik yang dimiliki, semakin tinggi

pula akses pada ekonomi sehingga akhirnya diharapkan mereka dapat mengentaskan dirinya sendiri.

Itulah sebabnya Amartya Sen berasumsi bahwa kemiskinan itu terjadi karena kekurangan demokrasi. Rakyat sebenarnya bukan kekurangan uang, melainkan kekurangan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Memang yang menjadi refleksi adalah Orde Baru yang otoriter dan sentralistik yang dituding penyebab kemiskinan. Karena itu, dituntut adanya otonomi daerah agar masyarakat dapat berdemokrasi. Artinya, dengan adanya otonomi daerah, demokrasi dapat tumbuh kembang. Demokrasi makin tumbuh, maka iklim politik lebih terbuka. Akan tetapi, setelah sekian lama mengalami otonomi daerah dan transisi demokrasi apakah demokrasi itu tumbuh dan secara apresiatif mampu menanggulangi kemiskinan.

Sejak tahun 1999--2009 kehidupan demokrasi cukup mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Fenomena bertumbuh kembangnya partai politik, proses pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung), masyarakat (perempuan dan laki-laki) berpartisipasi dalam partai politik, dan masyarakat bebas berpolitik merupakan suasana yang dijumpai di daerah-daerah. Namun, pertanyaannya apakah fenomena tersebut merupakan indikator demokrasi atau legitimasi demokrasi. Ternyata pemerintahan daerah yang desentralistik masih sebatas wacana. Tidak selalu otomatis dan instan bahwa perubahan struktur pemerintahan berimbas positif bagi rakyat di daerah.

Pengalaman pemilihan kepala daerah secara langsung, misalnya, hanya menghasilkan antrian panjang rakyat untuk ikut memilih kepala daerah di tempat pemungutan suara. Akan tetapi, itu terjadi setelah bupati/gubernur/wakil bupati/wakil gubernur yang terpilih tidak lagi memerintah secara demokratis. Perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbangda), yang dipakai sebagai legitimasi partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat desa (musrenbangdes) dengan harapan dapat mengapresiasi dan merepresentasi, mengakomodasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dalam praktiknya dibuat sebagai *lips servive*. Masyarakat (rakyat) yang hadir tidak merepresentasi kelompok kepentingan secara menyeluruh, menggunakan metode asal jadi. Masyarakat juga tidak dilibatkan dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Rakyat seakan menghadiri proses demokrasi sebagai prosedur saja dalam demokrasi.

Pengalaman sebuah LSM di NTT juga merefleksikan kehidupan politik di era otonomi daerah. Bahwa meskipun telah banyak partai politik yang melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diharapkan dapat menelurkan kebijakan publik yang lebih prorakyat, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan rakyat. Elite politik yang duduk di tengah demokrasi perwakilan tidak mewakili kepentingan konstituennya, tetapi kepentingannya sendiri. Leo Simanjuntak (2005), aktivis LSM, mengatakan sebagai berikut: "...Kualitas intelektual para elite politik sangat diragukan dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pembangunan saat ini. Akan sangat berisiko bahwa keputusan-keputusan yang berkonsekuensi pada kehidupan orang banyak, seperti kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, kemiskinan, kehilangan lapangan pekerjaan, ketidakpastian hukum, ketidakadilan ekonomi, dan pelanggaran HAM harus dipercayakan pada anggota parlemen dan eksekutif yang tidak mempunyai kapasitas cukup dan juga tidak pernah berkonsultasi

pada rakyat....” Kasus pembabatan tanaman rakyat, seperti kopi, vanili, jambu mete, pisang, dan sekaligus klaim tanah negara di Kabupaten Manggarai, sudah menunjukkan kebijakan bahwa bukan saja eksekutif yang salah, melainkan juga legislatif.

Lebih jauh, Simanjuntak (2005:277) mengatakan, “... Pengambilan keputusan publik masih dibuat melalui mekanisme politik formal. Namun, mayoritas para elite politik di kursi legislatif diisi oleh mereka yang kurang memiliki integritas, kapasitas intelektual, bahkan ketidakmampuan memperjuangkan agenda otonomi dan kedaulatan rakyat secara partisipatif. Kesalahan utama adalah sistem demokrasi tersebut meminggirkan sepenuhnya akses masyarakat pada pengambilan keputusan-keputusan publik...rakyat banyak (atau rakyat biasa), yang hidup di sudut-sudut kota dan pelosok-pelosok pedesaan republik yang katanya republik ini tidak mempunyai akses sama sekali terhadap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Semua pengambilan keputusan-keputusan publik dilakukan pada dan oleh mekanisme-mekanisme politik formal, yang mempresentasikan sebuah sistem demokrasi yang sering disebut demokrasi perwakilan...”

Bahkan, ironisnya lagi, idealnya, partai politik harus menjadi dapur untuk menggodok isu-isu dan kebijakan publik. Akan tetapi, bagaimana ia menjadi dapur kalau kehadiran partai politik saja baru menjelang pemilihan legislatif, dan orang-orang yang aktif dalam partai politik tidak melalui kaderisasi yang baik dan kontinu. Dapat dibayangkan ketika orang-orang yang berasal dari partai dan kelak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menentukan kebijakan publik, seperti masalah kemiskinan.

Celakanya lagi, menyangkut kebijakan publik, ternyata, seperti yang diungkapkan Soetrisno (2005:178), “...Apabila kita menanyakan kepada perencana pembangunan di NTT atau yang berada di pusat tentang masalah dasar pembangunan yang dihadapi oleh provinsi yang ini, jawaban yang selalu saya peroleh adalah jawaban klasik bahkan condong berbau klise dari masalah-masalah pembangunan nasional. Para perencana pembangunan itu akan mengidentifikasi masalah-masalah, seperti kepadatan penduduk, rendahnya mutu SDM, dan sederet masalah lain yang pada dasarnya secara nasional merupakan masalah pembangunan. Dengan membangun provinsi ini, kita justru harus memahami masalah-masalah dasar dari provinsi ini dan bukan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan provinsi ini dengan masalah-masalah pembangunan nasional. Mengetahui masalah yang khas dihadapi oleh provinsi ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu strategi yang khas pula untuk memecahkan masalah-masalah khas provinsi.”

Akhirnya, apa yang dikatakan Nugroho (2001:118) mungkin benar, yaitu “~~...Ketidakberhasilan itu kiranya bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran neoklasik, yaitu masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi semata-mata. Akibat dari pandangan tersebut, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat bawah hanya terbatas pada upaya perbaikan kondisi ekonomi dan perubahan nilai-nilai budaya melalui proyek pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas. Sedikit para ahli pembangunan yang memahami bahwa problema kemiskinan juga bersumber pada tata politik yang~~

timpang.” Jika demikian, perlu pemberdayaan terhadap komunitas masyarakat miskin jika kemiskinan hendak dientas (ditanggulangi). Paradigma *people centered development* dengan manajemen sumber daya lokal adalah salah satu keniscayaan itu. Meminjam bahasa para aktivis LSM : “pemberdayaan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan budaya”.

Siapa yang harus terlibat dalam menanggulangi kemiskinan? Tentu saja LSM memiliki keterbatasan untuk mengentas kemiskinan dengan mengacu pada paradigma seperti itu. Pemerintah harus memelopori metode kerja pemberdayaan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Partai politik harus menjadi sumber kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Demikian juga legislatif harus memproduksi kebijakan yang sanggup mengentas kemiskinan. Jangan sampai telajur ‘dunia’ mengetahui bahwa sumber kemiskinan justru berasal dari kebijaksanaan yang salah.. ‘Celaka kalau ‘dunia’ mengetahui bahwa sumber kebijakan itu justru di partai politik, birokrasi, dan legislatif. Setidak-tidaknya, bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini sebuah proposal kemiskinan. Namun, yang jelas kemiskinan dan paradigmanya sama-sama mencari resultan.

PENUTUP

Tulisan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan memiliki parameter, dimensi, implementasi, dan paradigmanya sendiri. Kemiskinan tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari paradigma pembangunan. Pembangunan pun memiliki paradigmanya sendiri baik secara teoretis maupun praksis. Keduanya, baik paradigma pembangunan maupun kemiskinan, memiliki garis kehendak diri yang hendak bertemu dalam sebuah titik (temu), yaitu masyarakat sejahtera adil-makmur. Titik temu antara garis kehendak kemiskinan dan garis kehendak paradigma pembangunan itulah sebuah resultan. Kemiskinan masih merupakan fakta yang akut, karena paradigma pembangunan dan kemiskinan masih harus berjuang terus mencari resultan. Mencari titik temu, bukan saja mungkin (niscaya) dilakukan, tetapi bisa! Artinya, sejauh garis paradigma pembangunan dan garis parameter/dimensi kemiskinan tepat, maka yang harus dibenahi adalah *political will* pemerintah, metodologi, ideologi, komitmen, dan konsistensi. *People centered development* diyakini merupakan sebuah paradigma yang tepat menjadi pedoman dan tonggak arah (rujukan). Sejauh tidak mengenakan parameter dan dimensi kemiskinan yang terjebak dalam ukuran ekonomistik semata (melainkan kultural dan struktural), kemiskinan niscaya teratasi. Tentu untuk menggapai titik temu (resultan) itu butuh demokratisasi.

PUSTAKA ACUAN

Clarke, Philip. *Kompas*, 12 Maret 1999.

Effendi, Tadjudin Noer. *Metode Partisipatoris Menuju Pemberdayaan*. Makalah.

Faqih, Mansoer. 2008. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Simanjuntak, Leo. 2005. Komunitas yang demokratis, alternatif terhadap pembusukan demokrasi pada masa transisi ini. Dalam *Alfa Omega dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Sentralisme Productions.

Soetrisno, Loekman. 2005. Membangun Indonesia bagian Timur: Untuk rakyat kecil di provinsi NTT. Dalam *Alfa Omega dan Transformasi*. Jakarta: Sentralisme Productions.

Sunyoto, Usman. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2002. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

YAO (Yayasan Alfa Omega). 2005. *Alfa Omega dan Transformasi Sosial*. Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Alfa Omega.